

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi meningkatkan persaingan antara para pelaku bisnis, dimana saat ini semakin meningkatnya perkembangan bisnis dan usaha dari waktu ke waktu. Banyak cara yang akan dilakukan oleh para pelaku bisnis agar bisnisnya dapat di pertahankan dari ketatnya persaingan saat ini. Salah satunya dalam pengelolaan manajemen dan pengoptimalan sumber daya perusahaan yang di gambarkan dalam suatu laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan catatan yang memberikan sebuah informasi dari suatu perusahaan pada periode tertentu, dengan menggambarkan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan juga sangat berguna untuk pihak internal dan eksternal, salah satunya yaitu pihak kreditur dan investor karena dapat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan, memberikan kredit, dan berinvestasi dalam bisnis. Pada laporan keuangan dihadapkan pada prinsip dan tujuan yang harus terpenuhi sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun agar tujuan dari laporan keuangan tersebut dapat tercapai maka sering kali manajemen menghadapi ketidakpastian dalam suatu kegiatan usaha perusahaan.

Konservatisme yang diartikan dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financian Accounting Statement Board*) yaitu suatu reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian yang melekat pada suatu perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis itu sudah cukup di pertimbangkan. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah variasi yang dapat di pilih manajemen ketika mereka menyusun laporan keuangan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghindari mengukur dan mengakui aktiva dengan terlalu terburu-buru serta segera mengakui hutang

dan kerugian yang mungkin terjadi untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Konservatisme sangat penting agar pengukuran dan pengakuan aktiva dan laba dapat dilakukan dengan hati-hati (Putra at.al., 2020).

Namun konservatisme tidak lagi digunakan dalam *International Financial Reporting Standar (IFRS)* sejak tahun 2010 dan di gantikan dengan istilah *Prudence*. Dimana perbedaan utamanya adalah jika syarat dalam pengakuan pendapatan telah dipenuhi, maka pendapatan dapat di akui meskipun realisasinya belum didapatkan. *Prudence* lebih berfokus pada kehati-hatian saat menilai suatu perusahaan dalam keadaan yang tidak pasti, sehingga penilaian aset, hutang, dan lainnya perusahaan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa rekayasa. Meskipun dalam *IFRS* konservatisme tidak lagi digunakan tetapi perusahaan masih menggunakan konservatisme dalam beberapa situasi, seperti kompensasi kerugian yang mengakibatkan pengakuan piutang pajak tangguhan, kapitalisasi biaya pengembangan, dan pengakuan cadangan piutang tidak tertagih (Apriani, 2020).

Pada *IFRS*, *prudence* akuntansi didefinisikan sebagai suatu perspektif yang mempertimbangkan pendapatan perusahaan selama periode tertentu yang sifatnya tidak pasti atau adanya potensi untuk memenuhi syarat pengakuan pendapatan yang berlaku namun dengan menerapkan konsep kehati-hatian dalam menjalankan pengungkapannya (Carolline & Sari, 2023). Menurut Rahardja & Herawaty, (2019) dalam hal pengaturan laba, *prudence* menggunakan kebijakan akuntansi untuk berusaha lebih banyak mengakui beban atau kerugian yang belum terjadi terlebih dahulu dan mengakui pendapatan atau laba hanya ketika pendapatan atau laba tersebut benar-benar terjadi. Akibatnya *prudence* menghasilkan lebih sedikit laba. Teknis penerapan *prudence* pada perusahaan tidak lepas dari kebijakan yang di buat oleh manajemen sendiri.

Prudence akuntansi sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntansi modern yang merujuk pada *IFRS*. Pelaporan keuangan yang lebih

baik sangat diperlukan oleh *IFRS*. Pendekatan nilai wajar bertujuan untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi dalam pengambilan suatu kebijakan. Konservatisme tidak lagi di anggap sebagai prinsip akuntansi yang relevan dalam konteks *IFRS*. Namun, selama era *IFRS*, perusahaan masih menghadapi ketidakpastia. Perusahaan dapat menggunakan *prudence* akuntansi untuk mencegah manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan karena prinsip ini dapat mencegah pelaporan keuangan yang *overstatement* (Rif'an & Agustina, 2021).

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus Pt Timah (TINS) yang bermula pada 15 April 2020 dimana manajemen Pt Timah tiba-tiba menyajikan laporan keuangan tahun 2018. Manajemen melakukan revisi yang signifikan, dimana sebelumnya laba bersih per 31 Desember 2018 berjumlah Rp.531,35 dan kini nilainya direvisi menjadi Rp.132,29 miliar. Hal tersebut menyebabkan laba bersih TINS tahun 2018 turun 73,67 persen dibandingkan perolehan tahun 2017. Jika pencatatan tersebut tidak terjadi, mungkin harga saham TINS saat menjelang pengumuman laporan keuangan tahun 2018 juga tidak akan melonjak secara signifikan (Kompas.com, 2020).

Adapun fenomena lain yang menunjukan kurangnya prinsip *prudence* akuntans di dalam penyusunan laporan keuangan yang *overstatement*. Adanya kecurangan pada PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018 yang berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$809 ribu, berbanding pada tahun 2017 yang merugi US\$216,58 juta yang menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskarla menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018. Chairul Tanjung dan Dony Oskarla merupakan perwakilan dari PT Trans Alrways selaku pemegang saham Garuda dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen. Hingga saat ini, polemic laporan keuangan Garuda Indonesia terus berganti (CCN Indonesia, 2019).

Dari fenomena tersebut dikhawatirkan akan terjadinya kemungkinan terburuk khawatir akan mengalami kerugian di periode yang akan datang.

Untuk mencegah kesalahan persepsi antara periode yang berjalan dengan periode dengan yang akan datang. Oleh karena itu manajemen harus menyajikan laporan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntansi prudence. Untuk menyajikan laporan-laporan keuangan dengan prinsip prudence maka manajemen harus mempertimbangkan faktor-fakto yang mempengaruhi prudence akuntansi (Mubarak et al., 2022).

Menurut Usbah & Primasari (2020), berdasarkan *Earning accrual measure* adaptasi dari Giovalyn dan Hayn (2000) bahwa pengukuran *prudence* menggunakan *Conservatisme Based On Accrud Items* memfokuskan pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka percaya bahwa prudence akan menghasilkan akrual negatif yang berkelanjutan. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan arus kas kegiatan operasi dan laba bersih sebelum depresiasi dan amortisasi. Jika nilai akrualnya negatif berarti perusahaan telah menerapkan *prudence* akuntansi. Namun apabila nilai akrualnya positif maka perusahaan dikatakan kurang menerapkan *prudence*. Hal ini di dukung oleh teori bahwa *prudence* akan mempercepat penggunaan biaya dan memperlambat pengakuan pendapatan sehingga hal ini direalisasikan untuk menghindari *overstatement* keuntungan.

Berikut peneliti sajikan perhitungan *prudence accounting* pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2023, dengan menggunakan *Conservatisme Based On Accrud Item* atau *Conacc* dimana ukuran akrualnya di ukur dari selisih antara laba bersih setelah pajak atau laba tahun berjalan ditambah depresiasi dan amortisasi dikurangi arus kas operasi kemudian dikalikan dengan -1 dan hasilnya dibagi dengan total aset (TA).

Menurut Luthfiyah & Utami (2022), sektor usaha di Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Salah satu sektor yang menjadi andalan ekspor di Indonesia yaitu pertambangan, terutama sub sektor batu bara. Mereka mengutip dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang menyatakam bahwa sub sektor batu bara memiliki prospek yang cerah

dan nilai ekspor yang besar, sehingga berkontribusi besar pada sektor pertambangan. Namun pada tahun 2019 sub sektor batu bara menghadapi tantangan yang ditunjukkan oleh penurunan harga batu bara secara global. Dalam kondisi seperti ini, penerapan prinsip *prudence* menjadi sangat penting bagi perusahaan batu bara agar dapat bertahan dan berkembang. Kehati-hatian dalam strategi keuangan, investasi, dan manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi volatilitas harga, regulasi pemerintah yang terus berkembang, serta transisi menuju energi terbarukan.

Šestanjić-perić & Kozjak (2020) menyatakan bahwa jika informasi keuangan ingin bermanfaat, informasi tersebut harus relevan dan secara akurat mewakili apa yang dimaksudkan untuk diwakili. Penerapan IFRS memengaruhi penggunaan prinsip *prudence* dalam akuntansi karena standar ini menekankan pelaporan keuangan berbasis nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi. Dalam kerangka IFRS, konservatisme tidak lagi menjadi prinsip utama. Namun, perusahaan tetap menghadapi ketidakpastian, sehingga prinsip *prudence* tetap diperlukan dan harus diterapkan secara proporsional dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan.

Peneliti memilih sub sektor batu bara dalam penelitian dikarenakan sub sektor batu bara merupakan salah satu sektor yang memiliki volatilitas harga yang tinggi, risiko keuangan yang tinggi dan tuntutan tata kelola perusahaan yang ketat dan transparansi. Harga batu bara yang sangat fluktuatif akan menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan perusahaan, dimana hal ini mempengaruhi penerapan *prudence* akuntansi dalam menghadapi kondisi yang dinamis.

Tabel 1. 1

Hasil Perhitungan *Prudence Accounting* Perusahaan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023

NO	KODE	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA	KETERANGAN
1	ADMR	0,000	0,067	-0,002	0,111	-0,086	0,018	R

NO	KODE	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA	KETERANGAN
2	ADRO	0,066	0,089	0,053	0,095	-0,068	0,047	R
3	AIMS	0,003	-0,046	-0,012	0,000	0,019	-0,007	T
4	ALII	0,000	0,000	0,000	-0,327	-0,422	-0,150	T
5	ARII	0,030	0,087	0,044	0,013	0,077	0,050	R
6	BBRM	0,093	0,337	-0,029	0,072	0,057	0,106	R
7	BESS	0,153	-0,023	-0,007	0,084	0,063	0,054	R
8	BIPI	-0,089	-0,098	-0,138	-0,095	-0,062	-0,096	T
9	BOSS	-	-	-	-	-	-	-
10	BSML	0,052	0,048	0,014	0,085	0,010	0,042	R
11	BSSR	-0,225	-0,190	-0,066	-0,144	0,294	-0,066	T
12	BUMI	-0,019	0,093	-0,071	-0,257	-0,034	-0,058	T
13	BYAN	-0,145	0,009	0,100	-0,044	-0,160	-0,048	T
14	CANI	0,000	0,169	0,077	0,017	0,225	0,098	R
15	CBRE	0,111	0,051	-0,031	0,022	0,004	0,031	R
16	CNKO	-0,181	0,428	0,052	0,547	0,136	0,196	R
17	COAL	-	-	-	-	-	-	-
18	CUAN	0,185	0,046	0,000	0,215	-0,071	0,075	R
19	DSSA	0,039	0,129	0,229	0,120	0,049	0,113	R
20	DWGL	0,116	0,110	-0,033	0,167	0,074	0,087	R
21	FIRE	-0,021	0,134	0,134	0,196	-0,020	0,085	R
22	GEMS	0,044	0,050	0,015	-0,005	-0,113	-0,002	T
23	GTBO	0,097	0,001	0,009	-0,092	0,027	0,008	R
24	HRUM	0,006	-0,029	0,033	0,013	0,008	0,006	R
25	IATA	0,122	0,164	0,049	-0,251	-0,212	-0,025	T
26	INDY	0,041	0,063	0,113	0,099	0,005	0,064	R
27	ITMG	-0,219	-0,053	-0,014	-0,424	-0,487	-0,239	T
28	KKGI	0,055	0,108	0,102	-0,039	-0,050	0,035	R
29	MAHA	0,000	0,000	0,000	-0,221	-0,052	-0,137	T
30	MBAP	-0,036	-0,070	-0,373	-0,582	-0,144	-0,241	T
31	MBSS	0,115	0,163	0,063	0,098	-0,034	0,081	R
32	MCOL	0,000	0,190	0,053	-0,018	-0,030	0,049	R
33	PSSI	-0,704	-0,610	-0,602	-0,529	-0,532	-0,595	T
34	PTBA	0,009	0,044	0,074	-0,008	-0,085	0,007	R
35	PTIS	-	-	-	-	-	-	-
36	RIGS	0,257	0,126	0,152	0,053	0,134	0,144	R
37	RMKE	0,000	0,032	0,079	-0,070	-0,055	-0,003	T
38	SGER	-0,052	-0,010	-0,015	-0,132	-0,081	-0,058	T
39	SMMT	0,008	-0,004	-0,136	0,003	-0,102	-0,046	T
40	TCPI	0,105	0,084	0,124	0,115	0,096	0,105	R
41	TEBE	-0,018	0,016	0,065	0,023	-0,007	0,016	R

NO	KODE	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA	KETERANGAN
42	TOBA	0,128	0,098	-0,053	0,013	0,014	0,040	R
43	TPMA	-0,662	-0,776	-0,653	-0,666	0,092	-0,533	T
44	TRAM	0,000	0,000	0,000	0,192	0,169	0,072	R

Sumber : Penulis 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, nilai *prudence accounting* pada perusahaan sub sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2023, masih terdapat sebanyak 25 perusahaan atau 61% yang memiliki nilai *prudence* nya rendah atau memiliki nilai akrual yang positif, sedangkan 16 perusahaan atau 39% telah menerapkan nilai prinsip *prudence* yang menunjukkan akrual negatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan subsektor batu bara yang belum menerapkan prinsip *prudence* akuntansi pada laporan keuangannya. Menurut Heryadi & Agustina, (2023) prinsip *prudence* ini membantu manajer dalam hal berkaitan dengan kontrak yang mana menggunakan laporan keuangan sebagai suatu medianya. Pihak yang mendukung penerapan prinsip *prudence* ini juga menginginkan agar perusahaan tidak melaporkan usahanya secara berlebihan, sehingga pihak eksternal seperti kreditor dan investor yang menggunakan laporan keuangan tidak tertipu dan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan hanya karena aset yang nominalnya tinggi (*overstated*).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *prudence* akuntansi. Menurut Heryadi & Agustina, (2023) faktor yang dapat mempengaruhi *prudence* akuntansi adalah variabel *financial distress*, ukuran perusahaan dan leverage. Menurut Choirunnissa & Fitria, (2022) yang mempengaruhi *prudence* akuntansi adalah asimetri informasi, *financial distress*, kepemilikan manajerial, leverage dan profitabilitas. Menurut Wardoyo dan Veronica, (2017) *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan dua hal. Pertama, penting bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan benar

dan tepat waktu. Kedua, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder secara akurat, tepat waktu dan transparan. Penelitian ini hanya berfokus pada 3 variabel yang diduga dapat mempengaruhi tingkat penerapan *prudence accounting*, diantaranya adalah *financial distress*, *asymmetry information*, dan pengungkapan *good corporate governance*.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *prudence* akuntansi adalah *financial distress*. Menurut Andani & Nurhayati, (2021), *financial distress* adalah konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. *Financial distress* dapat berupa munculnya sinyal atau gejala awal kebangkrutan dari kondisi keuangan perusahaan yang menurun, atau kondisi yang telah terjadi sebelum kebangkrutan. Menurut Aristiani et al (2017), adanya masalah atau gejala awal kebangkrutan, perusahaan akan lebih hati-hati saat melaporkan laporan keuangan yang tidak pasti. Dalam perspektif teori agensi, kondisi *financial distress* meningkatkan potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena manajer mungkin memiliki insentif untuk menyembunyikan informasi keuangan yang sebenarnya guna mempertahankan kepercayaan investor dan kreditur. Selain itu, dalam konteks teori sinyal, perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat memberikan sinyal yang menyesatkan dengan melakukan *overstatement* aset atau pendapatan untuk menarik investor dan mempertahankan reputasi di pasar. Manajer akan menghindari tekanan dan resiko pelanggaran kontrak jika mereka dianggap tidak mampu mengelola perusahaan saat mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (*financial distress*), semakin banyak manajer yang ingin mengurangi prinsip kehati-hatian (*prudence*) untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik. Hal ini terjadi dalam bentuk *overstatement* aset atau pendapatan untuk menarik investor atau kreditur. Penelitian ini menggunakan pengukuran model Altman Z-Score untuk

melihat bagaimana tingkat *financial distress* mempengaruhi *prudence* akuntansi pada suatu perusahaan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten yaitu menurut Carolline & Sari (2023), Heryadi & Agustina (2023) dan Mubarok et al., (2022) *financial distress* berpengaruh positif terhadap *prudence* akuntansi. Sedangkan menurut Putra & Sari (2020), Aryani & Muliati (2020) dan Rivandi & Ariska (2019) mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi.

Faktor selanjutnya adalah asimetri informasi, asimetri informasi merupakan kondisi dimana terjadinya ketika manajer dan pemegang saham tidak mengetahui bagaimana kinerja manajemen berdampak pada perusahaan (Aryani & Muliati, 2020). Manajemen diharuskan melakukan pengungkapan penuh apabila ingin mengatasi asimetri informasi terhadap kondisi perusahaan yang terjadi. Menurut Tunggal & Lasdi (2021), adanya asimetri informasi dapat mempengaruhi perusahaan dalam penerapan *prudence* akuntansi, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses bisnis mengakibatkan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan mengenai bisnis dan informasi keuangan lainnya. Dalam konteks teori agensi, perbedaan informasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), sehingga meningkatkan risiko tindakan oportunistik oleh manajemen. Oleh karena itu, dalam perspektif teori sinyal, perusahaan perlu memberikan sinyal positif melalui penerapan prinsip *prudence* agar pemangku kepentingan, terutama investor, memperoleh keyakinan terhadap kredibilitas laporan keuangan. Sedangkan manajemen secara langsung terlibat dalam setiap proses bisnis perusahaan dan memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemangku kepentingan. Menerapkan *prudence* dengan baik, investor akan lebih percaya terhadap laporan keuangan karena informasi yang di berikan lebih akurat dan transparan dengan mengurangi potensi manipulasi laporan keuangan yang

terjadi akibat adanya asimetri informasi. Dalam penelitian ini menggunakan *bid-ask spread* untuk mengukur asimetri informasi sebagai salah satu ukuran likuiditas antara manajemen dan pemegang saham.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten yaitu menurut Choirunnissa & Fitria (2022) dan Mumayiz, Afyani et al (2020) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *prudence*. Dalam penelitian Carrolline & Sari (2023) dan Amalia et al (2024) asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi.

Faktor lain yaitu pengungkapan *good corporate governance*. Menurut Herbert & Agwor (2021), pengungkapan *good corporate governance* merupakan penyampaian informasi yang relevan mengenai kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan kepada publik. Informasi ini mencakup langkah-langkah yang diambil sebagai respon terhadap kebijakan *good corporate governance*, yang bertujuan untuk membimbing atau mempengaruhi keputusan para investor serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pengungkapan *good corporate governance* berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan melalui publikasi informasi terkait tata kelola yang diterapkan. Menurut Novitasari (2022), semakin baik perusahaan menerapkan *corporate governance*, maka diharapkan perilaku manajemen tidak *overstatement*, yang berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan hati - hati (*prudence*). Dalam perspektif teori sinyal, pengungkapan *good corporate governance* yang baik dapat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan *Good corporate governance* berhubungan dengan kualitas informasi mengenai kualitas informasi tata kelola perusahaan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan sangat penting untuk kepercayaan investor. Akibatnya, akuntan manajemen yang bekerja harus menyediakan informasi yang cepat, akurat, tepat waktu, dan dapat

dibandingkan dengan indikator yang sama. Pengukuran Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada penelitian ini diukur dengan indeks pengungkapan *Good Corporate Governance* dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan nilai ekonomis, yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan (Putranto & Raharja, 2013).

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian terkait pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *prudence* akuntansi. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti terkait GCG, maka pada penelitian ini peneliti ingin menjadikan pengungkapan *good corporate governance* sebagai salah satu variabel independen. Karena penelitian mengenai Pengungkapan *good corporate governance* terhadap *prudence* akuntansi masih terbilang sedikit.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Asimetri Informasi Dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Prudence* Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh *financial distress*, asimetri informasi dan pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap *prudence* akuntansi?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
4. Apakah pengaruh pengungkapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memperoleh hasil empiris mengenai:

1. Pengaruh *financial distress*, *asimetri informasi* dan pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap *prudence* akuntansi.
2. Pengaruh *financial distress* terhadap *prudence* akuntansi.
3. Pengaruh *asimetri informasi* terhadap *prudence* akuntansi.
4. Pengaruh *good corporate governance disclosure* terhadap *prudence* akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh *financial distress*, *asimetri informasi* dan *good corporate governance disclosure* terhadap *prudence* akuntansi, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan dalam penerapan prinsip *prudence accounting* dan menjadi suatu bahan evaluasi atas penerapan *prudence accounting* yang sudah di lakukan selama ini.

2. Bagi Pihak Investor

Pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya mengenai *prudence accounting*, baik sifatnya melanjutkan atau melengkapi.